

NUKILAN PEMIKIRAN DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN

oleh : Imam Barnadib

Pendahuluan

Pilihan pola asuh pendidikan yang biasanya ada tiga, yaitu otoriter, *baisses faire* dan demokratis, biasanya jatuh pada demokratis. Dengan demikian demokrasi sebagai pola asuh diharapkan melingkupi semua aspek dan sistem pendidikan. Pendidikan seyogyanya selalu bernuansa demokratis.

Adanya demokrasi dalam pendidikan telah diamanatkan oleh UUD 1945, dengan adanya alinea yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran (baca pendidikan) 1) Selama ini diwujudkan secara horisontal dan vertikal.

Horisontal, karena pendidikan diusahakan merata, dan vertikal, karena siapapun yang mampu memperoleh jalan untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya.

Tulisan ini akan menyetengahkan beberapa diskripsi tentang yang dimaksud dengan pendidikan yang demokratis, aspek-aspek pendidikan yang perlu dicermati agar tidak menghambat perwujudan demokratisasi pendidikan. Tulisan juga akan menyetengahkan suatu analisis tentang bagaimana suatu proses pendidikan yang bernuansa demokratis dengan basis aliran progresivisme, perenialisme dan rekonstruksianisme.

Suatu Interpretasi

Kalau dalam proses yang bernuansa otokratis, titik berat proses itu ada pada pendidik, pada *laissez Faire* ada pada peserta didik, pada yang demokratis berimbang antara pendidik dan peserta didik. Dan yang otoriter perintah satu keinginan pendidik tidak bisa lain kecuali ditaati oleh peserta didik, pada yang *laissez* peserta didik dilepas sedemikian untuk melakukan yang diinginkan, sedangkan pada yang demokratis terjadi dialog sampai tercapai atau terpenuhinya keinginan peserta didik dan perestuan oleh pendidik. Jelaslah, bahwa pada pendidikan yang bernuansa demokratis berlangsung dalam proses-proses yang berkesinambungan.

Perlunya demokratisasi

Berhubung telah adanya demokratisasi pendidikan sejalan dengan yang diamanatkan oleh UUD dan lebih-lebih dewasa ini demokrasi merupakan salah satu arus utama globalisasi 3), sudah barang tentu demokratisasi dalam pendidikan perlu diupayakan semaksimal mungkin di Indonesia. Tentu saja wujud dan mekanisme demokrasi dalam artian politik baik penentuan, bentuk, serta penjabarannya menjadi wewenang rakyat beserta wakil-wakilnya dengan lembaga-lembaganya yang relevan.

Bahwa pendidikan telah bernuansa demokratis nampak dari berbagai pernyataan resmi yang telah ada misalnya, rumusan menjadi tujuan pendidikan dewasa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya

Pengembangan kehidupan yang cerdas adalah universal dan manusiawi. Ditilik dari salah satu aspek pendidikan, khususnya pendidikan umum (general education), pengembangan kecerdasan berarti pengembangan manusia agar terhindar dari hal-hal yang serba kekurangan mental dan fisik. Selanjutnya, pengembangan manusia seutuhnya berarti pengembangan penuh sesuai eksistensi. Hal ini akan tercapai bila berlangsung dalam suasana kebebasan, demokratis, hingga pendidikan dapat menyambut Leithlinie (sajian hidup) tiap peserta didik untuk dibantu realisasinya.

Suatu Gambaran Permasalahan

Hal umum yang lain yang perlu memperoleh perhatian yang cukup mahal semboyan yang bersumber pada demokrasi dalam pendidikan yang berbunyi kesamaan dalam kesempatan pendidikan (equality of educational opportunity). Secara selintas semboyan ini sama dengan apa yang berbunyi dalam UUD 45 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran (baca: Pendidikan)

Bila dalam perwujudan wajib belajar yang dewasa ini berlangsung sebagai pendidikan dasar 9 tahun dapat memberikan beban yang cukup ringan bagi keluarga, nampaknya tidak demikian pada tingkat-tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pada tingkat menengah baik umum maupun kejuruan dan teknologi, ditambah dengan pendidikan tinggi diperlukan pembiayaan lebih.

Pada tingkat pendidikan di atas taraf wajib belajar nampaknya peserta didik dapat tertinggal dalam kaitan dengan latar belakang sosial ekonomi. Dalam alam demokrasi pun masih ada stratifikasi sosial dan tinggi rendahnya status sosial dalam kaitan dengan taraf penghasilan untuk kehidupan. Mereka yang berada pada taraf rendah akan terhambat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi.

Maka sudah sepatutnyalah bila untuk mereka ini dapat disediakan dana pendukung yang berasal dari berbagai sumber seperti pemerintah maupun swasta.

Khusus dalam kaitan dengan otonomi daerah yang sudah di ambang pintu, hal ini nampaknya perlu memperoleh perhatian khusus. Kalau wajib belajar di suatu daerah telah berhasil berarti taraf pendidikan universal (nasional) telah berhasil pula. Namun, berhubung ekonomi belum mapan (sustainable) tercapainya perolehan pekerjaan dan kehidupan yang layak sebagaimana dijanjikan oleh UUD 45, masih juga bervariasi diantara warga masyarakat. Lebih-lebih lagi bila batas usia minimum bagi seseorang untuk mencari pekerjaan belum dapat ditetapkan seperti dewasa ini, kebijakan pendidikan yang dikaitkan dengan lapangan kerja perlu diciptakan.

— — Kebijakan ini dapat ditempuh dengan mempertajam bobot komponen pendidikan kemandirian, kreatifitas untuk suatu ketrampilan tertentu, terutama yang tampak dibutuhkan untuk suatu daerah. Ini pada taraf pendidikan menengah. Bagi mereka yang secara akademik mempunyai prospek secara akan diberi jalan dengan kebijakan tertentu. Ini memenuhi pendidikan demokrasi vertikal dalam pendidikan.

Hambatan demokratisasi pendidikan yang terkait dengan faktor sosial ekonomi akan dapat dikurangkan bila pemberdayaan masyarakat menunjukkan kebrhasilannya. Khususnya, pemberdayaan ekonomi rakyat. Oleh karena demokrasi tidak dapat menyingkirkan stratifikasi sosial baik dalam arti tinggi-rendahnya status seseorang menjadi tugas pendidikan yang demokratislah untuk mengusahakannya. Sebagaimana telah disinggung di muka peserta didik yang kurang beruntung dibantu dan memperoleh pendidikan yang membawa kepada kemandirian, kreativitas, serta disertai oleh ketrampilan tertentu.

Berhubung meritokrasi baik dalam pendidikan maupun jasa di masyarakat menjadi pedoman dalam penentuan status seseorang, pendidikan yang demokratis seyogyanya mengikuti dengan baik-baik. Artinya pendidikan hendaknya memberikan penilaian terhadap peserta didik secara proporsional.

Meskipun demokratis itu memberikan hak sama kepada peserta didik, tiap peserta didik mempunyai keunikannya sendiri, baik secara potensial maupun dalam proses pemekaran potensi-potensi tersebut. Jadi, dengan kata lain perbedaan-perbedaan individual (*individual differencis*) perlu diperhatikan. Apabila pendidikan dengan pendekatan holistik integratif dilakukan secara konsekuen, maka wawasan kependidikan menjadi sangat luas. Pada waktu ini pendekatan ini perlu dicermati secara memadai, karena pendekatan yang lazim ada sekarang cenderung kepada reduksionisme. Nampaknya reduksionisme sekarang menyebelahkan kepada aspek akademik intelektual.

Dalam hal ini sistem pendidikan sekarang (baca : sistem persekolahan) menyebelahkan ke sana. Dan hal pendidikan perlu membantu perkembangan semua potensi. Maka, karena pada dasarnya, pada umumnya, sekolah menitikberatkan pada aspek-aspek akademik intelektual, hendaknya tetap berusaha memperhatikan aspek-aspek lain. Hal ini dapat dilakukan dengan melewati ekstra kurikuler atau ko-kurikuler.

Menyeimbangkan Wawasan

Meskipun pendidikan itu seyogyanya menggunakan pendekatan holistik interaktif, namun bila dicermati adanya sejumlah pendekatan nampaknya yang muncul adalah penyebelahan. Dengan mengambil contoh aliran progresivisme pereniatisme serta rekonstruksionisme, hal tersebut akan dijelaskan seperlunya.

Wawasan pada progresivisme dengan tekanannya pada pandangan bahwa manusia itu adalah makhluk yang bebas, kreatif dan dinamis dan berpembawaan untuk maju, maka pendidikan itu pada hakekatnya menekankan pada bantuan untuk pertumbuhan dan perkembangan individu. Dengan kata lain pendidikan itu adalah pengelolaan terhadap perbedaan-perbedaan individual (individualdiferencis) sampai pada tingkat optimalnya.

Perennialisme dengan pandangannya bahwa manusia itu adalah makhluk budaya, maka pendidikan adalah transformasi budaya yang sifatnya hakiki dan mapan, dengan menghindari sikap-sikap yang bernuansa kekolotan. Yang utama ialah mentransformasikan pengetahuan dan ilmu, dan pada individu peserta didik yang perlu dikembangkan adalah kecerdasan dengan segala macamnya.

Rekonstruksianisme, dengan pandangannya bahwa manusia dengan pendidikannya itu mempunyai hubungan timbal balik dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, maka dalam nuansa demokratisasi pun perbedaan dan ketimpangan seminimal mungkin atau menyingkirkan sama sekali. Maka pendidikan itu tidak lain adalah wahana rekonstruksi sosial.

Terlepas dari adanya "kemenyebelahan" dari masing-masing aliran itu, bila masing-masing itu ditempatkan pada konteks pendidikan secara utuh mempunyai kebenaran. Dengan basis pandangan progresivisme kebebasan, pertumbuhan serta perkembangan individu terjamin, dengan basis pandangan perennialisme, khasanah budaya terutama yang baik penguasaan maupun pengembangannya memerlukan dukungan rasionalitas dan intelektualisme upaya untuk meng-eliminasi ketimpangan terjamin..

Kiranya itulah bila secara keseluruhan disatukan merupakan perwujudan demokrasi dalam pendidikan, yang dengan sendirinya merupakan upaya ke arah

pendidikan yang holistik interaktif. Persoalannya bagaimana supaya "penyatuan" bukanlah sesuatu yang semu (artificial) tetap suatu kewajaran.

Berikut dikemukakan sebuah contoh, khusus mengenai pemilihan standard mata pelajaran atau bidang studi. Terlebih dahulu akan dikemukakan "kelemahan" masing-masing pendekatan. Walaupun progresivisme yang menjadi dasar fikiran itu tahap-tahap pertumbuhan perkembangan peserta didik, maka yang rumit adalah pertumbuhan dan perkembangan awal. Maka kesibukan dalam penentuan mata pelajaran atau bidang studi terlebih pada usaha menyesuaikan (matahnya) pada tahap tersebut. Untuk tahap-tahap berikutnya dapat terabaikan. Lebih-lebih bila penentuan itu berorientasi pada pengalaman (environment bond). Maka, dapat dikatakan wawasan progresivisme tepat untuk usia-usia muda peserta didik, dan penentuan mata pelajaran atau bidang studi bersendikan pengalaman.

Pada perenialisme, tekanan pada pengetahuan dan ilmu yang mapan secara historis dan kultural itu menunjuk pada pentingnya pengembangan kecerdasan, kerasionalan, dengan mudah dapat direformasikan kepada kesenian bebas (liberal art). Tekanan pada pengembangan kecerdasan itu dengan sendirinya dapat dikongruensikan pada irama pertumbuhan dan perkembangan individu sebagaimana ditunjukkan oleh progresivisme.

Pemilihan matpelajaran atau bidang studi seyogyanya selalu menunjuk kepada aspek substansial dan sekuensial. Untuk ini diperlukan pengembangan rasionalis yang memadai sebagai pendukungnya. Pada rekonstruksianisme, tuntutan masyarakat serta kedudukan pendidikan dalam konteks itu sangat penting artinya. Hubungan pendidikan dengan masyarakat dapat digambarkan sebagai : pendidikan ada (eksis) karena diperlukan oleh masyarakat (sui genesis); pendidikan berusaha untuk memenuhi tuntutan tersebut; upaya atau hasilnya dikembalikan kepada masyarakat; dan masyarakat meningkatkan tuntutannya.

Bila masyarakat dalam keadaan normal, pendidikan mempunyai peran sebagai sarana konstruksi, sedangkan bila ada berbagai ketimpangan pendidikan menjadi sarana rekonstruksi dan rekonstruksi ini dapat silih berganti. Dengan memperhatikan diskripsi di muka, maka pemilihan matapelajaran atau bidang studi sui genesis. Misalnya dalam usaha pengembangan masyarakat menjadi masyarakat membaca, yang diperlukan adalah melek huruf yang fungsional.

Suatu gambaran proses yang demokratis

Pertanyaan yang timbul berikut adalah : seyogyanya bagaimanakah penentuan matapelajaran atau bidang studi yang demokratis itu? Suatu pandangan mengenai hubungan antara fihak-fihak yang berkuasa atau memimpin dengan warga masyarakat, yang termasuk ke dalam lingkup demokratis ialah bilamana suatu kebebasan melingkupinya, fihak yang berkuasa atau pimpinan selalu memberi kesempatan kepada yang dipimpin untuk memberdayakan diri. Pemberdayaan diri itu seyogyanya bukanlah yang bersifat *laissez faire*.

Jadi, seandainya kepala sekolah ingin membudayakan suatu wawasan agar menjadi pegangan bagi para pamong yang dipimpinnya, perlu dihindari cara-cara yang instruktif, lebih-lebih yang indoktrinatif. Dengan cara ini komunitas yang terdiri atas kepala sekolah dengan para pamong ini menjadi kuat. Untuk menjadi kuat ini, untuk para pamong perlu didudukkan profesionalismenya secara wujud. Lebih-lebih bagi pamong yang memahami bidang studi tertentu yang akan dipilih dan dikembangkan. Mereka ini lebih "unggul" dibandingkan dengan pamong-pamong yang lain. Dan, untuk suatu perkembangan keunggulan yang diperlukan keunggulan partisipatif serta dijalin oleh kerjasama.

Kembali kepada pemilihan bidang studi yang perlu digunakan pertimbangan penentuannya adalah adanya beberapa hal sebagaimana telah di muka, yaitu :

- a. Penentuan berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
- b. Ilmu atau pengetahuan tertentu;
- c. Keterkaitan dengan aspek-aspek kemasyarakatan.

Ilmu atau pengetahuan (b) ialah hal yang pertama-tama ditentukan identitasnya. Bahwa bagaimana penentuan materi sebagai kurikulum perlu mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik (a). Maka, dalam hal ini psikologi pendidikan dan teknologi pengajaran memperoleh tempat untuk dipertimbangkan.

Lain dari itu bagaimana keterkaitan bidang mata pelajaran atau bidang studi tersebut dengan masyarakat atau tata kehidupan mendapatkan gilirannya untuk dipertimbangkan. Baik wawasan progresif, perenialis perlu juga mendapatkan pertimbangan yang wajar.

Progresifisme menghendaki agar pendidikan konsisten melihat ke depan . Perenialisme menghendaki agar matapelajaran atau bidang studi yang dipilih hendaknya substansial an sich. Dengan mengkaitkan pada aspek-aspek kehidupan yang serba goyah dewasa ini, maka bila suatu mata pelajaran atau bidang studi telah ditentukan, hendaknya diimbangi oleh proses pembelajaran yang memadai. Yang dimaksud ialah yang membawa peserta didik kepada kemandirian dan kreatifitas.

Mandiri berarti tehindar dari kegoyahan. Untuk mencapai kemandirian, proses pembelajarannya perlu dilingkupi oleh nilai-nilai yang terpuji seperti kejujuran. Kejujuran diperlukan dalam usaha benar untuk mempelajari, dalam

mengerjakan pekerjaan rumah, dalam mengerjakan ulangan di kelas, dan kejujuran apakah peserta didik tahu hal-hal yang sulit difahami dan sebagainya. Jelas kemandirian diperlukan agar terhindar dari kegoyahan.

Demikianlah implikasi pandangan filosofis dalam penentuan matapelajaran atau bidang studi yang menggunakan pendekatan secara demokratis dan yang tertuju kepada kemandirian peserta didik.

Penutup

Dengan telah inherent nya demokrasi dalam pendidikan sebagaimana terdapat pada UUD 1945 ditambah dengan kedudukan demokrasi sebagai salah satu arus utama globalisasi dewasa ini, pada tempatnyalah demokratisasi dalam pendidikan dikembangkan secermat mungkin. Dalam pada itu demokrasi dalam artian politik sedang dikembangkan oleh rakyat dan wakil-wakilnya.

Demokrasi dalam pendidikan seyogyanya dikembangkan secara luas demi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara holistik, dan dengan memperkirakan adanya ketimpangan-ketimpangan sosial budaya di negara-negara yang telah demokratis. Hal-hal tersebut diharapkan menjadi jelas bila manajemen pendidikan tidak lagi tersentralisasi yang diimbangi oleh otonomi daerah yang dikelola secara bijaksana

Catatan

- 1) Pasal 31 UUD 1945.
- 2) Periksa H.A.R. Tilaar (1999) "Reposisi dan Reaktualisasi Sistem Pendidikan Nasional",

Makalah untuk BKS IKAPTISI, Wanagama, 11 – 12 September 1999.

- 3) Dikonstruksikan dari bacaan "Standard of Excellence in Democratic Classrooms" oleh James O, Lee Internet : AOL Com. 9/21/99.
